



PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Amir Hamzah GoTelp. (0721) 264009
BANDAR LAMPUNG

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BANDAR LAMPUNG

Nomor : 800 / /IV.40/2022

TENTANG

STANDAR PELAYANAN ADMINISTRASI PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2021

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BANDAR LAMPUNG

Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan peningkatan pelayanan bagi warga masyarakat di lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung, maka perlu adanya pengaturan Standar Pelayanan Administrasi yang cepat, akurat, efisien dan efektif.

b. bahwa untuk kelancaran pelayanan administrasi dimaksud dipandang perlu adanya standar pelayanan administrasi pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung.

Bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan

c. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung.

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 1821)

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301

3. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6), Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4437);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 No 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 5679);
6. Peraturan Pemerintah No 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 No 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3461);
7. Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4468);
8. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung;
9. Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

Menetapkan Standar Pelayanan Administrasi pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2022.

KESATU:

Standar Pelayanan Administrasi Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung meliputi ;

1. Pembuatan Pengantar Usulan Pensiun PNS
2. Pembuatan Pengantar Usulan Pensiun PNS Meninggal Dunia
3. Pengurusan Kenaikan Pangkat PNS Guru
4. Pengurusan Kenaikan Pangkat PNS Jabatan Struktural
5. Rekomendasi Izin Penelitian, PKL dan PPL
6. Rekomendasi Pindah Tugas / Mutasi PNS
7. Pengantar Usulan Izin Belajar PNS
8. Rekomendasi Izin Pendirian Lembaga PAUD, SD, SMP, Lembaga Non Formal LKP dan PKBM
9. Pelayanan Informasi Penyelenggaraan PAUD dan Pendidikan Kesetaraan Paket A, B dan C

10. Penerbitan Pergantian Surat Keterangan Kehilangan / Kerusakan Ijazah Pendidikan Kesetaraan Paket A, B dan C
11. Rekomendasi Pindah Rayon Siswa
12. Program Indonesia Pintar
13. Sertifikasi Guru
14. Penilaian Angka Kredit (PAK)
15. Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah
16. KTSP SD dan SMP
17. Dapodik SD, SMP, PAUD DIKMAS
18. Penyediaan Pembangunan Ruang Kelas Baru, Rehabilitasi SD, SMP, Sarana dan Prasarana
19. Rekomendasi Pembinaan Sanggar Seni, Pencatatan Sanggar Seni Alternatif, Penetapan Situs Cagar Budaya Dan Lisensi Penetapan Warisan Budaya Benda Tak Benda

KEDUA: Semua biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2022.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung

Pada Tanggal : 7 Januari 2022

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA BANDAR LAMPUNG,**

EKA AFRIANA, S.Pd

PEMBINA

NIP. 19730425 200804 2 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Walikota Bandar Lampung (sebagai laporan)
2. Inspektur Kota Bandar Lampung di Bandar Lampung
3. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Kota Bandar Lampung di Bandar Lampung
4. Himpunan Keputusan.

**STANDAR PELAYANAN
REKOMENDASI MUTASI SISWA
Tahun 2022**

No	Komponen	Uraian
1	Produk Pelayanan	Penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Tunjangan Profesi Guru (TPG)
2	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Pengantar 2. Info GTK per Semester tahun 2021 (download melalui Web https://info.gtk.kemdikbud.go.id/), ditandatangani yang bersangkutan dan diketahui oleh Kepala Sekolah; 3. Surat Pertanggung Jawab Mutlak yang di tanda tangani dan di ketahui Kepala Sekolah; 4. Fotocopy SK Pangkat dan atau SK berkala (terakhir); 5. Fotocopy SK Pembagian Tugas Mengajar; 6. Fotocopy NCR Bulan Januari 2021 dan Juli 2021; 7. Fotocopy Absen yang di ketahui oleh Kepala Sekolah.
3	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Sekolah memerintahkan Operator Sekolah untuk mengisi Aplikasi Data Pokok Pendidikan (Dapodik) secara berkala dan di sinkronkan secara online; • Operator sekolah mencetak Info GTK (data individu PTK) dari aplikasi Dapodik; • Info GTK ditandatangani PTK masing-masing mengetahui kepala Sekolah; • Tim Verifikasi dan Validasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menerima dan memverifikasi berkas usulan yang masuk; • Berdasarkan Dapodik, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan PTK penerima Tunjangan Profesi dengan menerbitkan SK Dirjen melalui (Sim Tunjangan) yang disampaikan ke Dinas pendidikan dan Kebudayaan.
4	Jangka Waktu Penyelesaian	Paling lama 15 (lima belas hari kalender) sejak permohonan diterima.
5	Biaya / Tarif	Tidak Dipungut Biaya / GRATIS
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>SP4N : lapor.go.id</p> <p>No. WA : 081273334996</p>

MUTASI SISWA DARI LUAR NEGERI

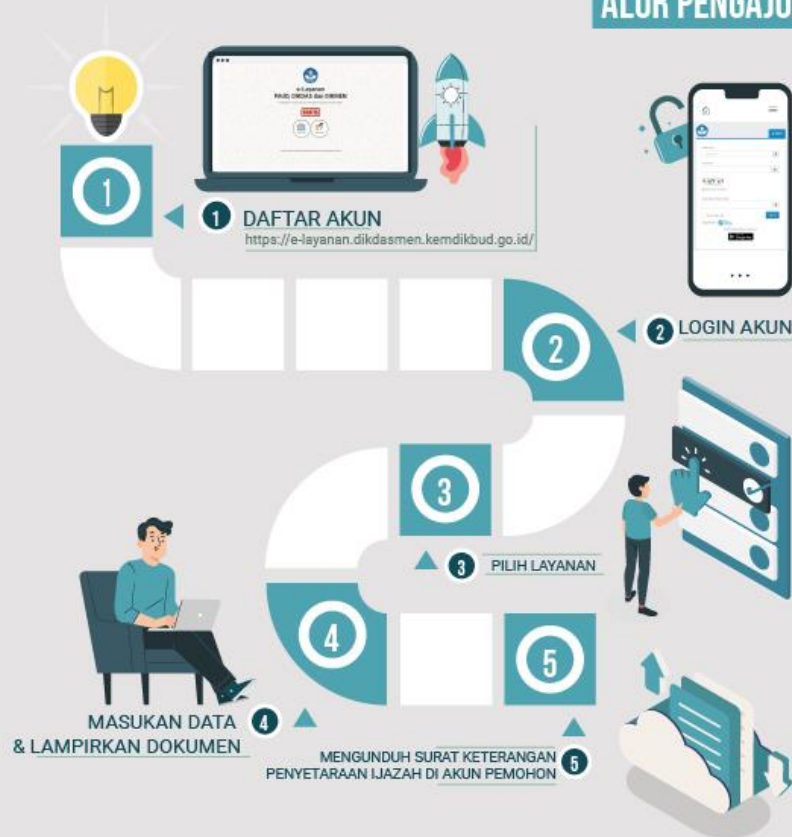


**MERDEKA
BELAJAR**



STANDAR PELAYANAN PENYETARAAN IJAZAH

ALUR PENGAJUAN



PERSYARATAN

- 1 Pas Foto Berwarna
- 2 Paspor dan stempel halaman paspor saat kedatangan di luar negeri/ Indonesia
- 3 Akta kelahiran
- 4 Surat keterangan dari KBRI/ KJRI di negara asal, atau perwakilan negara asal di Indonesia bagi WNI yg bersekolah di luar negeri/ surat keterangan dari sekolah asal bagi WNA yang bersekolah di sekolah asing di Indonesia
- 5 Ijazah/ Diploma/ Sertifikat
- 6 Ijazah SMP/ Rapor Kelas 9 (khusus Penyetaraan Ijazah SMA)
- 7 Transkrip nilai
- 8 Struktur kurikulum satuan pendidikan asal
- 9 Rapor tiga tahun terakhir sesuai jenjang yang akan disetarakan

**MAKSIMAL
5 HARI KERJA
SETELAH
DUKUMEN LENGKAP
GRATIS 100 %**

**MERDEKA
MELAYANI**

LAPOR!
LAYANAN ASPIRASI DAN PENGADUAN ONLINE RAKYAT



WhatsApp Helpdesk
081281435092

DIREKTORAT JENDERAL PAUD, DIKAS, DAN DIKEM